

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum dan bukan Negara atas kekuasaan maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Namun dalam kehidupan masyarakat kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat tersebut melakukan pelanggaran hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat tersebut seperti halnya perjudian sabung ayam.

Sabung ayam dalam prakteknya adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya, kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan/kerugian pada pihak lain.

Sabung ayam yang berarti judi tersebut dimaksud telah melanggar dari ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) tentang judi yang jelas dinyatakan dalam ayat (1) “diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah dengan dasar penjatuhan hukuman dalam Pasal 303 ayat (3) yang

¹ Jimly Ashsiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal 69

dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menurut Haryono Mintarum, Undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta berapa hukumannya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.² Dalam kasus perjudian Sabung Ayam dalam putusan Nomor 186/Pid.B/2016/PN.SBR dan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN.LBP yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini terdapat motif ekonomi. Hal ini didasari oleh pelaku yang dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam perkara tersebut diperlukan suatu penyelesaian hukum yang tepat, sehingga rasa keadilan dapat tercapai khususnya bagi pelaku perjudian sabung ayam dan warga yang resah.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara.³ Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Beberapa terobosan dalam peraturan yang sudah diterapkan tentu diutamakan agar Negara Indonesia ini semakin maju dan sistematis seperti

² <http://armingsh.blogspot.com/2011/01/judi-togel-semakin-meraja-lelah.html>. Diakses hari Minggu, 10 Februari 2020, Pukul 20.00 WIB.

³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hal 101

yang diharapkan dengan bersumber dan bertitik tolak pada undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang telah sebelumnya ditetapkan dan dilegalkan dengan sistem yang telah ada. Upaya dan strategi mutu yang dilakukan pemerintah untuk mencapai harapan dan tujuan utama yang berlandaskan pada hakikat kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁴

Hukum memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai alat kontrol atau pengendali sosial. Hal ini berarti bahwa hukum dapat menetapkan tingkah laku masyarakat yaitu mengenai apa yang menjadi keharusan dan apa yang menjadi larangan, serta apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.⁵ Menurut Aziz aktifitas perjudian sulit diberantas karena adanya faktor-faktor lain antara lain:

Pertama, bagi etnik tertentu perjudian merupakan suatu tradisi sehingga meskipun dilarang mereka tetap akan melakukan judi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. *Kedua*, keterbatasan dari aparat penegak hukum baik dari sisi jumlah personil maupun mental dan moralitasnya, sehingga pengawasan dan penertiban menjadi lemah. bisnis judi ber-omzet besar justru dibekingi oleh aparat penegak hukum. *Ketiga*, sangat sulit untuk mendapatkan saksi, karena pada umumnya para saksi-saksi merupakan orang-orang yang mempunyai ikatan bisnis perjudian tersebut. *Keempat*, cukong-cukong selain dibentengi oleh orang penting juga tergabung dalam suatu

⁴ Sugeng Tiyyarto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hal 19

⁵ Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare", *Ejournal Institut Agama Islam Negeri Kendari*, Kendari, 2014, hal 58

jaringan dengan struktur organisasi yang tersusun rapi, sehingga yang berhasil dijangkau aparat hanya bandar-bandar kecil.⁶

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tingkat kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka.

Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia. Berdasarkan uraian latar yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (STUDY KASUS PUTUSAN NO.186/PID.B/2016/PN.SBR DAN NO.1070/PID.B/2017/PN.LBP)”*.

B. Rumusan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain :

- 1) Pertimbangan-pertimbangan Hukum apakah yang digunakan oleh hakim, dalam memutus Perkara Tindak Pidana perjudian Sabung Ayam Putusan No.186/Pid.B/2016/PN.SBR dan No.1070/Pid.B/2017/PN.LBP?

⁶<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>, Diakses hari minggu, 15 November 2019, jam 10.00 WIB

- 2) Apakah hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana perjudian Sabung Ayam Putusan No.186/Pid.B/2016/PN.SBR dan No.1070/Pid.B/2017/PN.LBP telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk medalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Sabung Ayam dalam putusan No.186/Pid.B/2016/PN.SBR dan No.1070/Pid.B/2017/PN.LBP.
- b. Mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku oleh hakim dalam memutus Tindak Pidana Sabung Ayam dalam Putusan No.186/Pid.B/2016/PN.SBR dan No.1070/Pid.B/2017/PN.LBP.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana, yang berkaitan dengan pidana perjudian sabung ayam. Selain itu dengan

adanya tulisan ini penulis berharap dapat mengetahui ketentuan hukum yang berlaku oleh hakim dalam memutuskan tindak pidana perjudian sabung ayam dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.187/PID.B/2016/PN.SBR dan No.1070/PID.B/2017/PN-LBP.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca untuk mengantisipasi suatu tindak pidana terutama tindak pidana perjudian sabung ayam yang dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Pertimbangan hukum merupakan proses analisis (pengolahan) data hasil penelitian dengan menggunakan dua metode pendekatan untuk dua sasaran, yaitu: *Pertama*, menggunakan hukum pembuktian sebagai metode pendekatan untuk menguji kebenaran fakta sehingga menjadi fakta hukum. *Kedua*, menggunakan konsep hukum terapan sebagai metode pendekatan untuk diterapkan atas fakta hukum yang terbukti guna menjawab petitum.⁷ Segala sumber hukum yang dijadikan dasar untuk memutus harus dimuat dengan lengkap dan jelas, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan putusan karena pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dapat menentukan bahwa

⁷ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 6

putusan tersebut merupakan putusan yang bermutu dan berkualitas atau tidak. Putusan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁸

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mengandung asas keadilan. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Penilaian tentang seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya berada pada hakim. Keresahan akan muncul di dalam masyarakat apabila hakim dalam keputusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam kasus yang sama, walaupun keputusan tersebut sudah diambil dengan pertimbangan yang matang mengenai latar belakang masalah dan tentu juga motivasi serta keadaan dari terdakwa itu sendiri.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dan mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 292

⁹ *Ibid.*, hal 291

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini meliputi :

- 1) Perjudian adalah merupakan suatu delik kejahatan yang salah satunya diatur dalam pasal 303 KUHP dan Undang-undang no 7 tahun 1974.
- 2) seseorang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta merupakan suatu delik.
- 3) Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak.

E. Metode Penelitian

Dalam pembuatan penulisan hukum diperlukan suatu penelitian. Melalui penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan gejala menganalisisnya.¹⁰

Suatu penelitian pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan kebenaran atas sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan suatu penelitian tidak akan mencapai hasil yang diharapkan bila tidak ditunjang dengan metode yang tepat dan benar. Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul “*Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Analisis Terhadap Putusan*

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hal 4

No.186/PID.B/2016/PN.SBR dan No.1070/PID.B/2017/PN.LBP)” diperlukan data-data yang akurat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode baik dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data sampai analisa datanya. adapun metode penulisan dan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif. Pendekatan *Normatif* yaitu pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku berhubungan dengan judul skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Analisis Terhadap Putusan No.186/PID.B/2016/PN.SBR dan No.1070/PID.B/2017/PN. LBP)*”.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil sehingga hal ini dapat menemukan fakta, identifikasi masalah dan pemecahan masalah.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2014, hal 47

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian *Deskriptif*¹² yakni penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan Judi Sabung Ayam. Penelitian ini deskriptif dan menggambarkan atau melukiskan tentang peraturan yang berlaku, serta memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan kondisi-kondisi yang berpengaruh dalam timbulnya tindak pidana perjudian.

3. Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini terarah pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki¹⁴ seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 12

¹³ *Ibid*, hal 180.

¹⁴ *Ibid*, hal. 141.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- KUHP
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 186/PID.B/2016/PN.SBR;
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1070/Pid.B/2017/PN.LBP;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berlaku tidak bersifat mengikat terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hal. 296

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telusur pustaka untuk menyusun jenis penelitian kualitatif.¹⁶ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Patton menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁸ Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data-data yang telah terkumpul di analisis

¹⁶ D. A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986, hal. 183

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 107

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 103

secara kualitatif dalam bentuk narasi-narasi yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri No.186/PID.B/2016/PN.SBR dan No.1070/Pid.B/2017/PN.LBP. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, berasal dari aturan hukum yang mengatur tentang perjudian dan hukum acara dalam putusan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara Bab saling berkaitan dan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: Judul Skripsi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi: tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian sabung ayam dan tinjauan umum tentang hakim dan putusan pengadilan

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pertimbangan-pertimbangan Hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus Perkara dan hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Sabung Ayam dalam

Putusan No.186/Pid.B/2016/PN.SBR dan No.1070/Pid.B/2017/PN.LBP sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bab IV, Penutup, diuraikan tentang kesimpulan dari hasil uraian penelitian serta saran yang menjadi bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.